

**IMPLEMENTASI PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN  
(P2KP) BERBASIS LINTAS AGAMA**

Oleh :

Suyanto

**Univeritas Dr. Soetomo Surabaya**

suyanto\_fe@unitomo.ac.id

---

**.Article Info****Article History :**

Received 16 July - 2022

Accepted 25 July - 2022

Available Online

31 July - 2022

**Abstract**

*This study aims to identify and analyze forms of implementation of interfaith-based urban poverty reduction programs (P2KP), to identify and analyze the level of responsiveness in implementing poverty reduction program policies, to identify and analyze the level of community acceptance of poverty reduction program policies, and to determine and analyze the factors that influence the implementation of poverty reduction program policies in urban areas. The research method used is descriptive qualitative research. Descriptive method through a qualitative approach that aims to understand poverty alleviation in urban areas with research objects such as behavior, perception, motivation and carrying out other actions. The results of this study indicate that the forms of implementation of poverty reduction program policies in urban areas have been carried out according to the P2KP policy stages, government responsiveness in implementing poverty reduction program policies, the community accepts and supports poverty reduction programs, and communication factors, resources, attitude of implementers, and bureaucratic structure are factors that influence the successful implementation of P2KP policies. In cross-religious, especially Islam, in overcoming poverty we as Muslims have an obligation to raise the dignity of the poor. This is mentioned in the Qur'an surah al-Maa'uun verses 1-3 which means "Do you know those who deny religion? So that is the person who rebukes the orphan and does not encourage feeding the poor" and in the Sunnah of the Prophet that "Poverty is closer to disbelief, the upper hand is better than the lower hand".*

---

**Keyword :***Implementation, Government Policy, Poverty Reduction, Religion.*

---

**1. PENDAHULUAN**

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang ditandai dengan berbagai masalah seperti buruknya kualitas hidup masyarakat, terutama pada bidang kesehatan dan pendidikan. Kemiskinan selalu menempati posisi penting dalam diskusi dan pembangunan. Kemiskinan adalah sebuah keadaan yang berada di bawah garis garis umum keperluan minimal, baik dari segi pangan maupun non-pangan yang disebut dengan batas kemiskinan atau garis kemiskinan. Salah satu banyaknya program dari pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan adalah Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP).<sup>1</sup>

Dalam rangka menanggulangi berbagai masalah terkait kemiskinan masyarakat (terutama di perkotaan), pemerintah memiliki proyek nasional yakni P2KP. P2KP merupakan salah satu proyek nasional sebagai upaya pemerintah yang berkualitas pada program penanggulangan kemiskinan. P2KP direalisasikan oleh pemerintah dengan menggunakan strategi pemberdayaan sebagai dana modal sosial mendekati pembangunan yang berkepanjangan.

P2KP menggunakan pendekatan dengan melakukan pengukuhan terhadap lembaga masyarakat, sehingga nantinya dapat terbentuk perkumpulan organisasi yang dapat menjadi penampung dari perjuangan masyarakat miskin dalam mengemukakan harapan serta keinginan

---

<sup>1</sup> Johan Arifin, "Budaya Kemiskinan Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia," *Sosio Informa* 6, no. 2 (2020): 114–32.

mereka. Usaha ini nanti pada akhirnya diharapkan dapat dilakukan oleh masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan. Kelembagaan masyarakat yang bersifat lokal diharapkan dapat menjadi penggerak dalam memperadabkan dan mentradisikan kembali nilai-nilai kemasyarakatan dan kemanusiaan sebagai nilai primer yang mendasari segala aktifitas penanggulangan kemiskinan di perkotaan.<sup>2</sup>

Pembangunan nasional pada hakikatnya merupakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, yang mana difokuskan untuk peningkatan dan perbaikan kualitas masyarakat, baik batin ataupun lahir, rohani dan jasmani. Karena sifat pembangunan nasional yang multidimensional, maka juga dilakukan pemerataan pada segala bidang, sektor ataupun wilayah. Salah satu tujuan dari pengimplementasian pembangunan nasional adalah untuk mengurangi angka kemiskinan, maka dari itu untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan dari pemerintahan adalah dengan pengurangan jumlah masyarakat miskin.

Hal ini diakibatkan karena kemiskinan merupakan masalah sosial terbesar yang ada di seluruh dunia saat ini. Meskipun sudah banyak usaha yang dilakukan untuk menanggulangi kemiskinan terutama di Indonesia, tetapi kemiskinan masih saja menjadi masalah yang utama. Upaya penanggulangan perlu difokuskan terhadap upaya pemberdayaan masyarakat. Hal ini dikarenakan agar perkembangan dan pertumbuhan dapat berjalan secara rata serta berkelanjutan, sehingga di masa yang akan datang usaha untuk menanggulangi kemiskinan dapat dilakukan masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan.<sup>3</sup>

Dalam basis agama khususnya agama Islam sendiri, Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya diperuntukkan bagi manusia. Namun tidak berarti manusia boleh mengambil atau memakan harta manusia yang lain dengan cara batil. Harta merupakan titipan Allah sebagai perhiasan dunia, sebagai bekal untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada-Nya, dan juga sebagai ujian kedalaman iman seseorang, dan ia sebagai nikmat yang patut disyukuri bukan dikufuri. Kecintaan manusia terhadap harta benda secara berlebihan akan menyebabkan dia kikir atau bakhil, tidak mau bersyukur atas nikmat-Nya, bahkan manusia akan merasa cukup (sombong), serakah, lupa mengingat Allah dan segala sesuatu yang diwajibkan kepadanya, lupa dari kewajiban menjalankan ibadah, lupa dari zakat, sampai-sampai

lupa mati karena terlena dan terpesona dengan gemerlapnya harta.<sup>4</sup>

Kemiskinan merupakan penderitaan, cobaan, dan ujian, serta merupakan problematika kehidupan yang sangat membutuhkan penanggulangan atau solusi. Solusi yang diberikan tidak ahanya untuk orang miskin itu sendiri, tetapi diberikan kepada orang-orang yang diberikan kecukupan supaya dapat menafkahkan, memberi dan bersedekah kepada orang-orang fakir dan miskin sebagai golongan yang tidak memiliki keberuntungan dalam hal kecukupan ekonomi. Solusi ini dianggap penting dilakukan agar harta yang dikeluarkan dan disedekahkan oleh para orang kaya yang dermawan sampai kepada orang miskin sebagai orang yang mempunyai hak untuk itu.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai jenis penelitian secara deskriptif kualitatif. Metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami penanggulangan kemiskinan di perkotaan dengan objek penelitian seperti perilaku, presepsi, motivasi dan menjalankan tindakan-tindakan lainnya.

Melihat aspek-aspek terjadi tindakan di lapangan maka variable tunggal yang akan menjadi focus dalam penelitian Implementasi Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan, yang dikemukakan menjadi, yaitu :

- a. Aspek komunikasi untuk menyelenggarakan program penyuluhan terkait penanggulangan kemiskinan.
- b. Aspek disposisi yaitu karakteristik para pelaksana program penanggulangan kemiskinan di perkotaan terutama menyangkut aspek kecakapan, komitmen, dan konsisten.
- c. Aspek Birokrasi, agar mekanisme prosedur sesuai standart operasional untuk mengurangi tingkat kemiskinan di perkotaan.

Sumber data ini menggunakan data sekunder untuk mendapatkan mendapatkan data tertulis yang didapatkan dengan membaca buku, dokumen, literatur, dan tulisan yang berkesinambungan dengan judul penelitian.

Metode yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian secara kualitatif. Teknik pengumpulan data di dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka (*literatur study*), yang mana digunakannya teknik pengumpulan tersebut dilangsungkan untuk memperbanyak gagasan sebagai acuan penelitian ini.

<sup>2</sup> Ardito Bhinadi, *Penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat* (Deepublish, 2017).

<sup>3</sup> Arifin, "Budaya Kemiskinan Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia."

<sup>4</sup> Fina Nihayatul Khusna, "Spiritualitas Agama Dan Etos Kerja Masyarakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan Nelayan Desa Grajagan Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi," 2019.

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif, maka teknik analisis yang digunakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Reduksi data ini menggunakan poin-poin yang tersusun secara sistematis
- b. Penyajian data untuk menyajikan sesuatu penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan dalam bentuk narasi.
- c. Penarikan kesimpulan dengan membuka *field notenya* untuk menetapkan data-data yang diinginkan sehingga kesimpulan yang diperoleh serasi dengan apa yang diinginkan dalam penelitian ini.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Penyebab Kemiskinan dan Kolaborasi Pemerintah Terkait Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan

Kemiskinan dapat mengacu dalam suatu kondisi individual, kelompok, ataupun situasi kolektif yang ada pada masyarakat. Kemiskinan dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang saling terjalin satu sama lain. Adapun kemiskinan yang disebabkan oleh faktor tunggal, tetapi masih jarang ditemui di kalangan masyarakat. Beberapa faktor yang mempengaruhi kemiskinan diantaranya faktor ekonomi, pendidikan, serta hal lainnya. Seperti contohnya adalah mempunyai pendidikan rendah, tidak tersedianya atau kurangnya lapangan pekerjaan, terkena Putusan Hubungan Kerja (PHK), tidak mempunyai modal melakukan usaha, tidak memiliki jaminan sosial, mengalami kecacatan, tinggal di daerah terpencil dengan sumber daya dan infrastruktur yang terbatas, dsb.<sup>5</sup>

Kemiskinan merupakan suatu kondisi yang umumnya belum sepenuhnya dipahami oleh para pengambil keputusan. Berdasarkan pedoman umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan berdasarkan hal tersebut kemiskinan merupakan persoalan struktural mencakup aspek politik, sosial, ekonomi dan lain sebagainya.

Karakteristik kemiskinan merupakan suatu hal untuk menyadarkan semua pihak agar pelaksanaan penanggulangan kemiskinan yang ada di perkotaan perlu diperbaiki yaitu untuk mensejaterahkan lembaga penanggulangan kemiskinan.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) adalah sebuah program yang telah didirikan oleh pemerintah sejak tahun 2007 untuk penanggulangan kemiskinan dan ada beberapa bagian dari PNPM mandiri ini yaitu perdesaan,

perkotaan serta wilayah khusus untuk desa tertinggal. PNPM masyarakat perkotaan adalah sebuah program untuk mempersingkat penanggulangan kemiskinan di perkotaan secara sistematis dan berkepanjangan.

Peran birokrasi pemerintah dalam upaya menyukseskan program penanggulangan kemiskinan merupakan tujuan agar tingkat kemiskinan yang ada di perkotaan bisa terselesaikan. Peran birokrasi pemerintah mempunyai kedudukan yang vital dalam upaya menyukseskan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), hal tersebut dikarenakan birokrasi pemerintah sebagai penentu kelancaran serta kelangsungan dari program tersebut. Sehingga peran birokrasi pemerintah dalam tingkat kecamatan, kelurahan dan RT/RW yang mempunyai akses untuk pertanggung jawaban sebagai seorang pemimpin dalam pelaksanaan dan pendampingan (fasilitator).<sup>6</sup>

#### Strategi penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan

Strategi kebijakan penanggulangan kemiskinan yang ada di perkotaan untuk mengembangkan sebuah permasalahan-permasalahan kemiskinan yang ada di perkotaan. Dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri perkotaan, strategi penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan meliputi beberapa prosedur kegiatan di masyarakat, diantaranya :

##### 1. Rembug kesiapan masyarakat

Kegiatan ini merupakan serantaian kegiatan rembug atau rapat warga yang diadakan oleh perangkat desa/kelurahan serta masyarakat dengan mengajak semua warga dewasa.

Kegiatan ini bertujuan untuk masyarakat dalam menentukan, menyetujui, serta menyangkal campur tangan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) oleh pemerintah, sehingga terbentuknya relawan masyarakat yang sanggup menjadi kader komunitas untuk menganggulangi kemiskinan.

##### 2. Refleksi kemiskinan

Kegiatan ini merupakan suatu bentuk pembelajaran masyarakat dalam mendalami suatu pokok bahasan dengan melibatkan rasa, karsa, dan mental dengan tertata untuk membentuk pengetahuan kritis masyarakat terkait kemiskinan, serta yang berkaitan dengan pola pikir dan perilaku masyarakat sehari-harinya.

<sup>5</sup> Asna Aneta, "Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP)

Di Kota Gorontalo," *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik* 1, no. 1 (2012): 59.

<sup>6</sup> Aneta, 59.

- Kegiatan ini bertujuan untuk membentuk kesadaran masyarakat terhadap masalah kemiskinan yang sebenarnya juga merupakan masalah kepedulian semua pihak.
3. Pemetaan swadaya  
Kegiatan ini merupakan keikutsertaan masyarakat dalam memberi penilaian serta membuat rumusan sendiri mengenai berbagai masalah yang dihadapinya, serta mengasah kemampuan yang dimiliki masyarakat.  
Kegiatan ini bertujuan agar tumbuhnya keperluan nyata (riil) untuk menangani berbagai masalah kemiskinan, dengan berdasarkan banyaknya informasi kualitatif yang bersifat domestik, seperti tanggapan dan pemahaman masyarakat.
  4. Pembentukan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)  
Kegiatan ini merupakan pembentukan BKM sebagai lembaga independen yang dibentuk oleh masyarakat, sehingga BKM sebagai institusi masyarakat hanya dapat dibentuk serta diberhentikan atas kesepakatan, perizinan, dan keputusan dari semua komponen masyarakat yang ada pada tingkat desa/kelurahan.  
Kegiatan ini bertujuan agar adanya BKM benar-benar dikuasai oleh masyarakat, bukan semata-mata dikuasai oleh sekelompok perwakilan masyarakat, apalagi pihak yang berada di luar masyarakat.
  5. Penyusunan Program Jangka Menengah (PJM) Penanggulangan Kemiskinan dan Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan Kegiatan bersama dalam pemberdayaan ekonomi, sosial dan lingkungan.  
Kegiatan ini merupakan Program Jangka Menengah (JPM) yang menjadi pondasi dalam menanggulangi kemiskinan dengan persiapan yang baik.  
Kegiatan ini bertujuan agar dalam menanggulangi kemiskinan tidak dilakukan setengah-setengah, karena merupakan permasalahan yang kompleks.<sup>7</sup>  
Strategi penanggulangan kemiskinan di perkotaan yang sesuai dengan kondisi Indonesia dapat diambil melalui beberapa langkah, diantaranya :
    - a. Dari perspektif individu sebagai kepala keluarga (berusia lanjut):
      - 1) Diberikan kesempatan menjadi wirausaha, dengan terlebih dahulu diberikan pelatihan serta pendampingan.

- 2) Memberikan modal kepada yang bersangkutan lewat kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan pihak perbankan.
- 3) Setelah modal berupa uang telah diberikan, pihak yang bersangkutan diberikan bantuan modal fisik usaha, seperti gerobak, alat-alat yang diperlukan, dll.
- b. Dari perspektif individu sebagai kepala keluarga (usia sekolah dan pendidikan dasar):
  - 1) Diberikan kesempatan meneruskan pendidikan dasarnya.
  - 2) Diberikan pelatihan serta pendampingan agar bisa bekerja sambil meneruskan pendidikan, dengan cara pemberian modal usaha berupa uang dan fisik yang sesuai dengan kebutuhan usahanya.
  - 3) Bagi pihak bersangkutan yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), diberikan jaminan berupa biaya hidup untuk mencari sumber penghasilan baru oleh pemerintah.<sup>8</sup>

### **Implementasi Kebijakan Pemerintah Mengenai Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan dalam Lintas Agama**

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang mana kebijakan yang sudah disahkan, dieksekusi oleh bagian administrasi tertentu dengan mengontrol sumber daya dan sumber dana yang ada. Dalam penanggulangan kemiskinan, harus mengerti dan mendalami akar dari masalah kemiskinan yang terjadi di perkotaan. Selain itu, pemerintah juga harus memiliki strategi yang tepat untuk penanggulangan kemiskinan.

Implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di perkotaan mempunyai pengembangan berbagai inovasi salah satunya pengembangan tridaya, yaitu upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat pada esensi pokoknya, bidang ekonomi, bidang fisik, serta bidang sosial. Dalam artian, upaya untuk mensejahterakan masyarakat dalam kemandirian berusaha untuk keluar dari permasalahan kompleksitas kemiskinan.

Dalam implementasi penanggulangan kemiskinan dapat diawali dengan mempersiapkan pembentukan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang anggotanya terdiri dari relawan-relawan yang memiliki kepedulian terhadap masalah

<sup>7</sup> Pairan Pairan, "Poverty Alleviation Strategy," *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial* 14, no. 3 (2015): 299–300.

<sup>8</sup> pascaadm, "Kemiskinan dan Strategi Pengentasannya," *Pascasarjana Fakultas Ilmu*

kemiskinan yang terjadi (khususnya di perkotaan). Dalam pelaksanaannya, harus ditemani oleh pendamping lapangan. Adanya pendamping lapangan yang ahli dibidangnya adalah salah satu strategi yang sangat menentukan tingkat kesuksesannya.<sup>9</sup>

Disisi lain, selain ahli dalam bidang pemberdayaan masyarakat, pendamping lapangan diharapkan juga memiliki pengetahuan serta pemahaman yang kuat dalam bidang ke-agamaan, poin tambahan jika pendamping lapangan juga memiliki pengetahuan tentang kewirausahaan. Pendamping lapangan berfungsi sebagai fasilitator dalam proses pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dari awal sampai akhir (berhasil dalam memberdayakan masyarakat miskin). Dengan asanya pendamping lapangan, diharapkan dapat membimbing, mengarahkan, serta memberdayakan masyarakat sehingga mereka memiliki pemikiran positif yang dapat membantu mereka keluar dari kemiskinan.<sup>10</sup>

Anggota dari BKM dipilih secara pemilihan, siapapun yang mendapatkan suara terbanyak akan otomatis menjadi anggota BKM. Anggota BKM terdiri dari minimal 19 orang anggota dan maksimal 12-13 anggota, dengan suara yang terbanyak akan menjadi koordinator BKM. Sebelum dilaksanakan pemilihan anggota BKM, terlebih dahulu panitia pemilihan memaparkan beberapa poin, diantara lain:<sup>11</sup>

1. Barang siapa yang terpilih menjadi anggota BKM, harus ikhlas memperjuangkan rida Allah swt. dalam melaksanakan tugas, karena menjadi anggota BKM tidak mendapat upah.
2. Memiliki kepedulian atas nasib masyarakat miskin.
3. Jujur dalam mengemban amanah.
4. Pandai, kreatif, serta inovatif.
5. Pinter, Kober, dan Bener (PKB).
6. Memiliki niat untuk beribadah dalam menanggulangi kemiskinan.<sup>12</sup>

Panitia pemilihan harus memaparkan beberapa poin tersebut supaya anggota BKM nantinya memang benar-benar orang yang ikhlas beribadah memperjuangkan rida Allah swt. Para anggota BKM bekerja sama dengan ketua RT

setempat untuk melakukan pemetaan swadaya masyarakat, dengan kriteria sebagai berikut:<sup>13</sup>

1. Orang fakir, yakni orang yang tidak memiliki pendapatan dan pekerjaan tetap.
2. Orang miskin, yakni orang yang tidak memiliki pendapatan tetap dan pekerjaan tetap, tetapi masih tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari.
3. Orang yang tidak bisa mencukupi kebutuhan dasar pada umumnya.
4. Orang yang tidak bisa makan 3 kali sehari.
5. Orang yang tidak memiliki pendapatan tetap dan tempat tinggal.
6. Orang yang belum bisa memenuhi kebutuhan pokok makan satu hari 1 mut (6 Ons) dan makan daging satu minggu 2 kali (miskin menurut Islam).<sup>14</sup>

Di dalam Islam sendiri juga memiliki kriteria kemiskinan yang sesuai dengan kondisi saat ini yang telah disebutkan di dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60, yang artinya "Zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, para pengurus zakat, para *muallaf*, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang sedang dalam perjalanan". Di dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa kriteria kemiskinan ada 2, yakni orang miskin dan orang fakir (kondisinya lebih buruk daripada orang miskin).<sup>15</sup>

Setelah dilakukan pemetaan swadaya masyarakat dengan beberapa kriteria tersebut, lalu dikelompokkan lagi berdasarkan usia produktif atau berdasarkan potensi yang dimiliki yang dapat diberdayakan. Setelah itu dibentuk kelompok yang sesuai dengan potensi mereka dan kategori usaha masing-masing yang beranggotakan minimal 3 orang dan maksimal 5 orang. Kelompok-kelompok ini disebut dengan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). BKM lalu membentuk Unit Pengelolaan Keuangan (UPK) dengan fungsi mengelola dana pinjaman yang bergulir.<sup>16</sup>

Sebelum pemberian pinjaman modal bergulir, masyarakat terlebih dahulu diberi tausiah mengenai uang pinjaman di dalam Islam, niat membuka usaha untuk memperbaiki nasib di dalam al-Qur'an serta sunah Rasulullah saw. yang menerangkan bahwa, "Tangan diatas lebih baik

<sup>9</sup> Muhammad Subari, "STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM," *Jurnal Studi Islam: Pancawahana* 15, no. 1 (2020): 33.

<sup>10</sup> Subari, 33.

<sup>11</sup> Subari, 33–34.

<sup>12</sup> Subari, 34.

<sup>13</sup> Subari, 34.

<sup>14</sup> Subari, 34.

<sup>15</sup> Ririn Tri Puspita Ningrum, "Analisa Metode Penetapan Kriteria Kemiskinan dan Implikasinya Terhadap Standarisasi Mustahiq di Indonesia," *Engagement: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2017): 78, 81, 100.

<sup>16</sup> PNPM Mandiri Perkotaan, "Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pinjaman Bergulir" (Jakarta, 2010), 12.

daripada tangan dibawah". Maksudnya bahwa, orang yang memberi lebih baik daripada orang yang meminta-minta, adanya pernyataan ini dimaksudkan untuk mengubah mental masyarakat miskin agar menjadi mental pekerja, pengusaha, ataupun *entrepreneurship*. Masyarakat juga diberi pelajaran dan pelatihan untuk menggunakan uang pinjaman modal bergulir serta manajemen keuangan yang sederhana.<sup>17</sup>

Dalam kegiatan pemberian pinjaman modal bergulir memiliki sasaran utama rumah tangga miskin yang berpendapatan rendah di wilayah desa/kelurahan. Dalam hal ini khususnya masyarakat miskin yang sudah dikelompokkan di dalam daftar masyarakat miskin.<sup>18</sup> Dana untuk penanggulangan kemiskinan ini diperoleh dari hibah pemerintah, zakat, *infaq*, *shodaqoh*, dan wakaf, atau bisa disingkat ZISWAF, dll.<sup>19</sup>

Program yang didirikan oleh pemerintah pusat, wilayah, dan daerah termasuk kebijakan penanggulangan kemiskinan di perkotaan tidak saja membutuhkan dukungan dari masyarakat saja namun perlu berkolaborasi dengan pemerintahan. Hal yang terpenting adalah bagaimana tingkat respon pemerintah dan aparaturnya dalam mendukung kelancaran pelaksanaan kebijakan program penanggulangan kemiskinan di perkotaan.

Dalam prespektif ini respon pemerintah dapat dilihat dari daya tangkap pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat, kemampuan aparat dan pemerintah dalam mengenali kebutuhan masyarakat, dan tanggung jawab pemerintah dalam melaksanakan seluruh tahapan pada program penanggulangan kemiskinan di perkotaan khususnya dalam pengalokasian anggaran pada APBD agar lebih efektif dan efisien dalam kebutuhan masyarakat.

Solusi Islam sendiri dalam penanggulangan kemiskinan, yaitu dalam Islam telah menyatakan perang terhadap kemiskinan sebagaimana yang telah diutarakan oleh Sayyidina 'Ali ibn Abi Thalib, dan menyerangnya secara habis-habisan untuk menghindari bahayanya terhadap akidah, akhlak, dan prilaku, serta untuk melindungi keluarga dan masyarakat, menjaga ketenteraman dan keutuhan serta menjunjung tinggi semangat persaudaraan antar sesama Muslim. Untuk menghindari itu semua, Islam menawarkan beberapa solusi sebagai berikut:<sup>20</sup>

<sup>17</sup> Subari, "STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM," 34–35.

<sup>18</sup> Subari, 35.

<sup>19</sup> Didin Hafidhuddin, "Islam dan Penanggulangan Kemiskinan," *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam* 3, no. 1 (2018): 27–31.

<sup>20</sup> Sidqi Ahyani, "Kemiskinan Dalam Perspektif Al-Quran Dan Solusinya Dalam Pandangan Islam: Studi

Bekerja adalah cara dan senjata pertama dan utama dalam memerangi kemiskinan, bekerja juga dapat dikatakan sebagai upaya pertama dalam memperoleh kekayaan, serta sebagai unsur pertama dalam memakmurkan dunia yang dititipkan oleh Allah dan diperintahkan pula untuk memakmurkannya. Islam melihat pekerjaan dalam dua hal: Pertama, Islam membuka beberapa pintu pekerjaan yang sesuai dengan keahlian, pengalaman dan kecenderungan umatnya. Islam tidak mengharuskan pekerjaan tertentu selama pekerjaan tersebut jelas kemaslahatannya kepada masyarakat. Kedua, bekerja itu dapat memberi penghasilan berupa upah dan untung bagi pelakunya yang memungkinkannya memenuhi kebutuhan pokoknya dan menafkahai keluarganya. Hal ini bisa terlaksana apabila sistem Islam yang mengatur kemasayarakatannya, perekonomiannya, dan perpolitikannya, dapat membimbingnya kepada arah yang sesuai dengan syari'ah.

Jaminan hidup dari kerabut yang mampu, Islam berusaha menyelamatkan penganutnya dari derita kemiskinan. Islam memerintahkan kepada setiap keluarga untuk saling menjamin kehidupan satu sama lain, sebagai upaya untuk menanggulangi kemiskinan. Islam menjadikan setiap yang mempunyai hubungan kekerabatan untuk saling menjamin kerabatnya yang lain (yang kuat menjamin yang lemah, yang kaya menjamin yang miskin). Alasannya adalah ikatan dan hubungan di antara mereka cukup kuat dan sangat kokoh, karena mereka memiliki hubungan persaudaraan dan kekerabatan yang erat dan mempersatukan satu sama lain.<sup>21</sup>

Selanjutnya, tidak semua orang yang tidak mampu bekerja dan berusaha mempunyai kerabat dekat yang dapat menjamin dan membiayai ongkos hidupnya. Kemudian apa yang harus dilakukan oleh orang-orang yang lemah ini yang tidak punya kerabat? Islam tidak melupakan mereka yang tergolong fakir dan miskin. Allah Swt. telah menetapkan hak-hak orang fakir dan miskin dalam harta orang-orang kaya yang terlembaga dalam bentuk zakat. Tujuan utama Zakat adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup orang-orang fakir dan miskin.<sup>22</sup>

Masyarakat fakir dan miskin adalah sasaran pertama dari pengeluaran zakat. Dalam satu kesempatan Nabi Muhammad Saw. hanya menyebut

Pemikiran Sa'ad Ibrahim dan Yusuf Qardhawi Tentang Penanggulangan Kemiskinan," *Jurnal Kariman* 4, no. 1 (2016): 43–64.

<sup>21</sup> Subari, "STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM."

<sup>22</sup> Shidqi Ahyani, "Zakat dan Upaya Penanggulangan Kemiskinan dalam Perspektif Alquran," *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH* 4, no. 2 (2021): 215–36.

kelompok fakir dan miskin saja sebagai penerima zakat. Misalnya ketika beliau mengutus Mu'adz ke Yaman, beliau memerintahkan untuk memungut dari kelompok masyarakat kaya dan diberikan kepada golongan fakir dan miskin, juga karena dasar itulah Abu Hanifah dan para pengikutnya mengambil kesimpulan bahwa zakat tidak diberikan kecuali hanya kepada fakir dan miskin. Zakat dapat dikatakan sebagai salah satu usaha konkret dalam pengentasan kemiskinan yang harus diperangi. Maka dari itu, sangat tepat yang dilakukan Khalifah Abu Bakar pada masa kepemimpinannya, selain memerangi orang-orang murtad dan nabi palsu, beliau memerangi orang-orang yang tidak mau atau enggan membayar zakat, karena dianggap sebagai hal yang dapat melestarikan kemiskinan.<sup>23</sup>

Kemudian, solusi yang terakhir jaminan kas Islam. Negara Islam sebenarnya mempunyai kekayaan sebagai hak milik umum, yang dikelola dan dipergunakan untuk kepentingan umum, baik dikelola sendiri, disewakan, atau dikelola bersama pihak lain. Misalnya wakaf untuk kepentingan umum, termasuk di dalamnya pertambangan dan kekayaan alam yang lain. Sumber ekonomi tidak boleh dimonopoli secara individu, melainkan harus berada di tangan negara supaya masyarakatnya secara merata merasakan manfaatnya. Pada dasarnya seluruh pemasukan terhadap kas Islam merupakan sumber ekonomi bagi masyarakat fakir dan miskin, ketika perolahan dari zakat tidak dapat mencukupi kebutuhan atau permintaan. Dalam konteks ke-Indonesia-an, konsep ini sejalan dengan amanat pasal 33 UUD 1945 bahwa seluruh kekayaan alam yang terkandung di perut bumi Indonesia dikuasasi oleh Negara harus dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyatnya. Dalam pasal yang lain juga disyaratkan, bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara, dalam artian kesejahteraan hidupnya harus dijamin oleh Negara.<sup>24</sup>

#### 4. KESIMPULAN

Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) adalah salah satu program dari pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan di perkotaan. P2KP dilaksanakan melalui strategi pemberdayaan sebagai investasi modal sosial menuju pembangunan yang berkelanjutan.

Berbagai implementasi kebijakan P2KP telah dilakukan sesuai prosedur kebijakan P2KP. Responsivitas pemerintah terhadap implementasi kebijakan P2KP diharapkan dapat diterima dan didukung oleh masyarakat. Sehingga hal tersebut dapat mendukung beberapa faktor yang dapat

mempengaruhi keberhasilan implementasi P2KP, faktor-faktor tersebut diantaranya; faktor sumber daya, komunikasi, sikap eksekutor, serta struktur dan birokrasi.

Dalam implemenasi pertama-tama dapat dilakukan pembentukan Badan Keswadayaan masyarakat (BKM), lalu BKM bersama dengan ketua RT setempat membuat pemetaan swadaya masyarakat serta dikategorikan berdasarkan beberapa kriteria. Setelah itu barulah dibentuk kelompok masyarakat yang sesuai dengan potensi mereka yang bisa diberdayakan.

Setelah itu, BKM membentuk Unit Pengelolaan Keuangan (UPK) untuk mengelola dana pinjaman yang bergulir yang akan diberikan kepada kelompok masyarakat tadi. Sebelum pemberian pinjaman, tidak lupa masyarakat diberi tausiah tentang mengenai uang pinjaman di dalam Islam, niat membuka usaha untuk memperbaiki nasib. Adanya dana pinjaman bergulir untuk penanggulangan kemiskinan ini diperoleh dari hibah pemerintah, zakat, *infaq*, *shodaqoh*, dan wakaf, atau bisa disingkat ZISWAF, dll.

Program yang didirikan oleh pemerintah pusat, wilayah, dan daerah termasuk kebijakan penanggulangan kemiskinan di perkotaan tidak hanya membutuhkan dukungan dari masyarakat saja namun perlu berkolaborasi dengan pemerintahan. Hal yang terpenting adalah bagaimana tingkat respon pemerintah beserta aparaturnya dalam membantu kelancaran pelaksanaan P2KP di perkotaan.

Banyak sekali upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam penanganan kemiskinan di Indonesia. Namun, adanya kemiskinan masih saja menjadi masalah utama suatu negara. Dalam melaksanakan upaya penanggulangan kemiskinan, perlu difokuskan terhadap upaya pemberdayaan masyarakat. Hal ini dikarenakan agar perkembangan dan pertumbuhan dapat berjalan secara rata serta berkelanjutan, sehingga di masa yang akan datang usaha untuk menanggulangi kemiskinan dapat dilakukan masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan.

Dalam Islam sendiri untuk menanggulangi kemiskinan adalah dengan bekerja, jaminan hidup oleh kerabat yang beruntung dalam memperoleh harta benda, zakat, dan jaminan dari *baitul mal*. Sebab, bekerja merupakan upaya pertama dalam memperoleh kekayaan, serta sebagai unsur pertama dalam memakmurkan dunia. Jaminan hidup oleh kerabat merupakan upaya untuk menanggulangi dan menyelamatkan dari derita kemiskinan. Kemudian, zakat mempunyai tujuan utama untuk memnuhi

<sup>23</sup> Mujetaba Mustafa, Ammar Munir, dan Ismail Kappaja, "Zakat dan Penanganan Kemiskinan," *Al-Azhar Journal of Islamic Economics* 2, no. 2 (2020): 104–17.

<sup>24</sup> Ahyani, "Kemiskinan Dalam Perspektif Al-Quran Dan Solusinya Dalam Pandangan Islam."

kebutuhan hidup orang-orang fakir dan miskin. Dan jaminan dari *baitul mal* pada dasarnya merupakan sumber ekonomi bagi masyarakat fakir dan miskin yang di dapat seluruh pemasukan kas Islam, ketika perolehan dari zakat tidak dapat mencukupi kebutuhannya.

## 5. REFERENSI

- Ahyani, Shidqi. "Zakat dan Upaya Penanggulangan Kemiskinan dalam Perspektif Alquran." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2021): 215–36.
- Ahyani, Sidqi. "Kemiskinan Dalam Perspektif Al-Quran Dan Solusinya Dalam Pandangan Islam: Studi Pemikiran Sa'ad Ibrahim dan Yusuf Qardhawi Tentang Penanggulangan Kemiskinan." *Jurnal Kariman* 4, no. 1 (2016): 43–64.
- Aneta, Asna. "Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Di Kota Gorontalo." *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik* 1, no. 1 (2012): 54–65.
- Arifin, Johan. "Budaya Kemiskinan Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia." *Sosio Informa* 6, no. 2 (2020): 114–32.
- Bhinadi, Ardito. *Penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat*. Deepublish, 2017.
- Hafidhuddin, Didin. "Islam dan Penanggulangan Kemiskinan." *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam* 3, no. 1 (2018): 25–32.
- Mustafa, Mujetaba, Ammar Munir, dan Ismail Kappaja. "Zakat dan Penanganan Kemiskinan." *Al-Azhar Journal of Islamic Economics* 2, no. 2 (2020): 104–17.
- Nihayatul Khusna, Fina. "Spiritualitas Agama Dan Etos Kerja Masyarakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan Nelayan Desa Grajagan Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi," 2019.
- Ningrum, Ririn Tri Puspita. "Analisa Metode Penetapan Kriteria Kemiskinan dan Implikasinya Terhadap Standarisasi Mustahiq di Indonesia." *Engagement: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2017): 77–110.
- Pairan, Pairan. "Poverty Alleviation Strategy." *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial* 14, no. 3 (2015): 293–304.
- pascaadm. "Kemiskinan dan Strategi Pengentasannya." *Pascasarjana Fakultas Ilmu Administrasi* (blog). Diakses 28 Januari 2022. <https://pascaadm.ui.ac.id/kemiskinan-dan-strategi-pengentasannya/>.
- Perkotaan, PNPM Mandiri. "Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pinjaman Bergulir." Jakarta, 2010.
- Subari, Muhammad. "Strategi Penanggulangan Kemiskinan Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Studi Islam: Pancawahan* 15, no. 1 (2020): 28–36.